

OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN DASAR DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KLATEN

OPTIMIZATION OF THE ROLE OF BASIC EDUCATION IN POVERTY OF POVERTY IN DISTRICT OF KLATEN

Nur Afiyah Maizunati
Statistisi Pemerintah Kota Magelang

Abstract

The development results in Klaten Regency which is approached from the HDI indicator experienced a fairly good growth and even able to achieve the 6th highest position in Central Java in 2015. Nevertheless, the issue of poverty is still crucial in this region. Several studies have found empirical evidence that there is a negative relationship between education and poverty. Nevertheless, an increase in the quality of education indicators in Klaten Regency has not been sufficient to trigger the increase in productivity which is expected to contribute in reducing the poverty rate. This paper examines the relevance of the role of education in Klaten and the surrounding areas to poverty. Through the Random Effect Model, the results of this study indicate a significant positive relationship between the population who did not complete primary school with the percentage of poor people in Klaten, Sukoharjo, Wonogiri and Boyolali. An increase in the population who did not complete primary school in Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri and Boyolali by one percent will increase the percentage of poor people in those areas averaged by 1.495 percent (ceteris paribus). This study found no empirical evidence of the effect of school enrollment rates, especially on the age of compulsory education (7-12 years) and the percentage of literacy rates in the productive age group (15-55 years) on the percentage of poor people in Klaten, Sukoharjo, Wonogiri and Boyolali. However, the model estimation shows that the relationship of the variables is negative, although not significant.

Keywords: poverty, education, panel, Random Effect Model

Abstrak

Hasil pembangunan di Kabupaten Klaten yang didekati dari indikator IPM mengalami pertumbuhan yang cukup baik bahkan mampu meraih posisi ke-6 tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2015. Meskipun demikian isu kemiskinan masih krusial di wilayah ini. Beberapa penelitian telah menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif antara pendidikan dan kemiskinan. Namun demikian kenaikan pada indikator kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Klaten ternyata belum cukup mampu untuk memicu peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Melalui *paper* ini dikaji kembali keterkaitan peran pendidikan di Kabupaten Klaten dan wilayah sekitar terhadap kemiskinan. Melalui *Random Effect Model* hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara penduduk yang tidak tamat SD dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. Kenaikan penduduk yang tidak tamat SD sebesar satu persen akan meningkatkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali rata-rata sebesar 1,495 persen (*ceteris paribus*). Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris adanya

pengaruh antara angka partisipasi sekolah khususnya pada usia wajib belajar (7-12 tahun) dan persentase angka melek huruf pada penduduk kelompok usia produktif 15-55 tahun terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. Meski demikian, estimasi model yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut adalah negatif meski tidak signifikan.

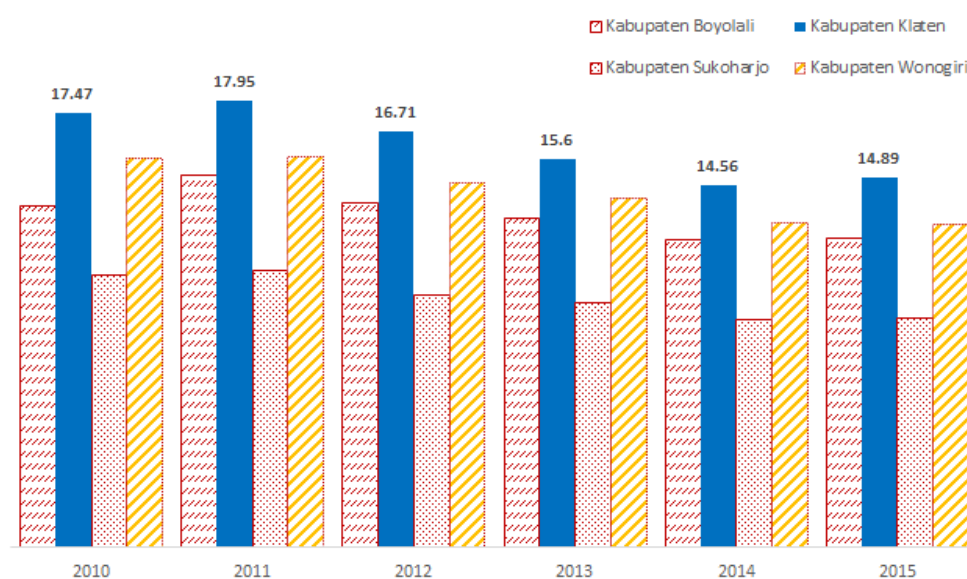
Kata kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Panel, *Random Effect Model*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Klaten merupakan wilayah administrasi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 655,56 km². Melalui 8 misi utama yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, pemerintah Kabupaten Klaten berusaha mewujudkan diri sebagai daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing. Visi tersebut tercermin dalam beberapa target indikator yang terus diupayakan tercapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan bersinergi pada SDGs dan tujuan makro nasional. Hasil pembangunan di Kabupaten Klaten yang didekati dari indikator IPM mengalami pertumbuhan 0,84% pada tahun 2015. IPM Kabupaten Klaten mampu meraih posisi ke-6 tertinggi di Jawa Tengah dengan perolehan indeks 73,81 jauh di atas IPM Jawa Tengah yang hanya berada pada angka 69,49. Meskipun demikian isu kemiskinan masih krusial di wilayah ini. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 340.484,- yang ditetapkan di tahun 2015, Kabupaten Klaten masih menanggungsejumlah 14,9% penduduk miskin. Persentase ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin di Jawa Tengah yang mencapai 13,6% di tahun yang sama. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan di tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 5,83% tentunya memerlukan upaya yang sangat berat.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dan Wilayah Sekitar Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

Fenomena kemiskinan di Kabupaten Klaten diperparah dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan dari 2,02% di tahun 2014 menjadi 2,72% di tahun 2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat celah yang makin lebar dari sisi pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Meskipun di tahun 2015 terdapat penurunan indeks gini dari 0,36 ke level 0,35, namun kesenjangan masih terjadi di dalam kelompok penduduk miskin. Hal tersebut terindikasi dari naiknya indeks keparahan kemiskinan dari 0,45 di tahun 2014 menjadi 0,72 di tahun 2015.

Jika ditilik lebih dalam peningkatan IPM di Kabupaten Klaten didominasi oleh pertumbuhan dari pengeluaran per kapita riil. Kenaikan juga terjadi pada komponen pendidikan, namun tidak begitu signifikan. Dari data BPS, di tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Klaten hanya sebesar 8,16 tahun atau setara jenjang SMP tingkat 2. Sedangkan harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas tercatat sebesar 12,84 tahun atau setara SMA tingkat 3. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten belum cukup baik.

Beberapa penelitian telah menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif antara pendidikan dan kemiskinan. Namun demikian kenaikan pada indikator kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Klaten ternyata belum cukup mampu untuk memicu peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Melalui *paper* ini akan dikaji kembali keterkaitan peran pendidikan di Kabupaten Klaten dan wilayah sekitar terhadap kemiskinan. Hasil dari *paper* ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi perumusan strategi dan penetapan skala prioritas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten khususnya dari bidang pendidikan.

Tujuan

Analisis dalam *paper* ini bertujuan untuk memberikan deskripsi perkembangan indikator pendidikan di Kabupaten Klaten dan kaitannya dalam pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten

Secara umum berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2015 program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Klaten mencakup 4 klaster sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (program perlindungan sosial)
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin (program pemberdayaan masyarakat)
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penganggulangan kemiskinan

Di Kabupaten Klaten skema tersebut teraktualisasi dalam 14 program unggulan yaitu:

1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Penanganan Jamban Keluarga
3. Sambungan Listrik Bagi Orang Miskin
4. Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
5. Kartu Indonesia Pintar

6. Beras Sejahtera (RASTRA)
7. Jaminan Hidup Lansia (JADUP LANSIA)
8. Pemberdayaan Difabel
9. Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
10. Pendidikan Untuk Semua (PUS)
11. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
12. Program Keluarga Harapan (PKH)
13. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
14. Desa Mandiri Pangan

Besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten di tahun 2016 mencapai Rp. 700,018 miliar dengan persentase terbesar dari APBN sebanyak 72,34%. Alokasi tersebut digunakan untuk mengcover lima bidang prioritas intervensi penganggulangan kemiskinan yang terdiri dari bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2016

No.	Instintusi/Program	APBN	APBD I	APBD II	Keterangan
1	DPU & ESDM	3.885.000.000		154.760.305.000	
2	Dinas Pertanian			30.000.000	
3	Dinas Pendidikan	182.314.150.000	1.516.000.000	6.339.400.000	
4	Dinas Kesehatan	168.500.079.500	1.679.736.000	9.845.342.000	
5	BAPERMAS		350.000.000	9.402.426.190	DBHCHT
6	Bag. Perekonomian	111.348.702.000		104.426.000	Bantuan Raskin
7	Disperindagkop & UMKM			4.004.861.000	
8	Kantor Ketahanan Pangan	365.349.840		43.648.500	
9	Dinsosnakertrans	38.166.593.750	160.000.000	5.392.761.000	
10	Program KOTAKU	1.809.420.000			
Jumlah		506.389.295.000	3.705.736.000	189.923.169.690	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan

Hasil Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Tahun 2016

Berdasarkan laporan penanggulangan kemiskinan tahun 2016, capaian indikator utama di bidang pendidikan dilihat dari keterbandingannya terhadap target RPJMD menunjukkan hasil evaluasi yang beragam sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No.	Indikator Utama	Time Series	Efektivitas
1.	APK SD/MI	Menurun, tahun terakhir naik	Memburuk, percepatan
2.	APK SMP/MTs	Fluktuasi, tahun terakhir turun	Membaik, perlambatan
3.	APK SMA/MA	Fluktuasi, tahun terakhir turun	Membaik, perlambatan
4.	APM SD/MI	Fluktuasi, tahun terakhir naik	Memburuk, percepatan
5.	APM SMP/MTs	Fluktuasi, tahun terakhir turun	Membaik,

No.	Indikator Utama	Time Series	Efektivitas
6.	APM SMA/MA	Fluktuasi, tahun terakhir turun	perlambatan Memburuk, perlambatan
7.	APS SD/MI	Fluktuasi, tahun terakhir naik	Membaik, percepatan
8.	APS SMP/MTs	Meningkat, tahun terakhir turun	Membaik, percepatan

Sumber: LP2KD Kabupaten Klaten Tahun 2016

Tabel tersebut mendeskripsikan bahwa penanggulangan kemiskinan khususnya di level pendidikan dasar belum menunjukkan kinerja yang optimal terlihat dari menurunnya tren indikator utama di beberapa tahun. Pendidikan dasar harus tetap menjadi prioritas, sebagaimana hasil studi empiris yang telah dijelaskan di tabel 2.

Deskripsi Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pemenuhan hak dasar pendidikan di Kabupaten Klaten meliputi:

- 1) Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin.
- 2) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal, perbatasan provinsi.

Dengan anggaran Rp. 190,169 miliar pengentasan kemiskinan Kabupaten Klaten di bidang pendidikan masuk dalam klaster-1 dengan beberapa jenis program yang telah dilaksanakan meliputi:

1) Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan skema program bantuan nasional yang bersifat langsung dan digulirkan untuk membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah (tnp2k, 2017).

Tabel 3. Persentase Peserta Program BSM Tahun 2014 di Kabupaten Klaten

Kepesertaan Program PKH	Kepesertaan Program BSM		Total
	Ya	Tidak	
Ya	2,50	2,64	5,14
Tidak	2,50	92,36	94,86
Total	5,00	95,00	100
Kepemilikan KPS	Kepesertaan Program BSM		Total
	Ya	Tidak	
Ya	2,50	5,00	7,50
Tidak	2,50	90,07	92,57
Total	5,00	95,07	100

Sumber: IFLS5 (diolah)

Riset yang penulis lakukan berdasarkan data sampel dari IFLS tahun 2014, penerima program BSM di Kabupaten Klaten hanya sebesar 5%. Sebanyak 2,5% dari penerima BSM tersebut juga merupakan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan memiliki kartu perlindungan sosial (KPS). Cakupan penerimaan BSM yang rendah ini perlu untuk ditingkatkan mengingat persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten cukup besar. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memverifikasi kembali data penerima bantuan dengan mensasar kelompok 2,64% peserta PKH dan 5% pemilik KPS yang belum menjadi peserta BSM. Hal tersebut karena dimungkinkan terdapat rumah tangga dengan anak usia sekolah yang potensial untuk menerima bantuan namun belum tercover dalam BSM.

2) *Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*

BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud program wajib belajar 9 tahun. Prioritas BOS adalah untuk biaya operasional non personal, meski juga dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

3) *Kartu Indonesia Pintar (KIP)*

Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat dari program Indonesia Pintar bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar, lembaga pelatihan dan kursus.

4) *Bantuan Pendampingan BOS*

5) *Beasiswa bagi siswa miskin dari jenjang pendidikan SD sampai dengan setara SMA.*

Berdasarkan pemutakhiran data PBDT tahun 2015 tercatat masih terdapat 10.410 anak usia sekolah di Kabupaten Klaten yang tidak bersekolah (AUS-TS). Nilai ini merupakan 10,03% dari total penduduk usia sekolah di Kabupaten Klaten. Dari total AUS-TS tersebut sebagian besar terjadi karena faktor bekerja (1.628 jiwa), difabel, penyakit kronis dan menikah. Program-program pendidikan harus berfokus pada kelompok ini agar tidak terjadi penurunan kompetensi khususnya pada penduduk usia pendidikan dasar. Rendahnya kompetensi dasar dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelemahan produktivitas yang meningkatkan kemungkinan seseorang masuk dalam jurang kemiskinan.

Riset Terdahulu

Hasil riset di Pakistan yang dilakukan oleh Awan dkk (2011) menemukan bahwa pendidikan berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kemungkinan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Hasil yang serupa juga dikemukakan oleh Coley dan Baker (2013) dalam studinya di Amerika. Mereka menemukan bukti bahwa perbedaan kemampuan kognitif balita, siswa sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi memiliki keterkaitan dengan perbedaan dalam pendapatan dan atau status kemiskinan. Perbedaan tersebut menurut mereka berkontribusi pada peningkatan stratifikasi ekonomi dan sosial dan memunculkan kesenjangan antara kaya dan miskin.

Sependapat dengan penelitian tersebut, Sukati (tanpa tahun) menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan terutama karena pendidikan merupakan hak asasi yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengurangi kesenjangan, meningkatkan derajat kesehatan seseorang, dan memperbaiki kompetensi dalam penelitian dan

pengembangan. Berdasarkan beberapa hasil studi tersebut tampak jelas bahwa pendidikan memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data runtun waktu dan data silang tempat (Wooldridge, 2009). Penelitian ini menggunakan sumber data dari BPS berupa data kemiskinan dari Kabupaten Klaten dan wilayah sekitar yaitu Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali tahun 2005-2015.

Instrumen dan Variabel Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif berupa regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2009: 15), analisis regresi merupakan studi hubungan sebuah variabel terikat pada satu atau lebih variabel bebas untuk mengestimasi nilai rata-rata hitung variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Pemodelan dalam penelitian ini didasarkan pada modifikasi studi Awan dkk (2011) yang meneliti pengaruh jenjang pendidikan, lama pendidikan dan gender pada kemiskinan melalui regresi logistik. Pada penelitian ini regresi yang digunakan adalah regresi data panel dengan proksi indikator pendidikan yang digunakan sebagai variabel bebas adalah persentase penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf. Estimasi model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$P_{0i} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{no_SD}_i + \alpha_2 \text{APS}_i + \alpha_3 \text{AMH}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

P_0 : Persentase penduduk miskin

No_SD : Persentase penduduk tidak tamat SD

APS : Persentase angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun

AMH : Persentase angka melek huruf penduduk kelompok usia 15-55 tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum

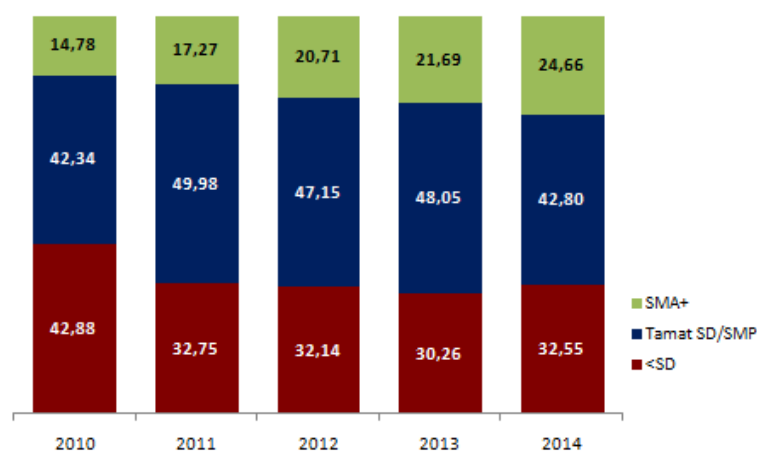
Dengan perolehan PDRB sebesar 29,117 triliun perekonomian Kabupaten Klaten mampu tumbuh 5,64% di tahun 2015. Klaten merupakan kabupaten yang terdiri dari 391 desa dan memiliki struktur perekonomian dengan dominasi nilai tambah barang/jasa dari sektor industri pengolahan; perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten diproyeksikan mencapai 1.158.795 jiwa di tahun 2015. Pengendalian kelahiran tercipta dengan cukup baik terbukti dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Angka ketergantungan di Kabupaten Klaten masih tergolong tinggi mencapai 48,75%. Meskipun memiliki bonus demografi, namun Pemerintah Kabupaten Klaten masih menghadapi tantangan dalam hal peningkatan kompetensi khususnya bagi kelompok

penduduk usia non produktif. Dari proyeksi penduduk tersebut terdapat 14,9% yang masuk dalam kelompok miskin dengan profil sebagai berikut:

1) Pendidikan

Penduduk miskin di Kabupaten Klaten mayoritas merupakan tamatan SD/SLTP. Peningkatan kompetensi terlihat dari makin menurunnya jumlah penduduk miskin yang tidak tamat SD rata-rata 2,58% per tahun. Penurunan ini menyebabkan kenaikan persentase penduduk miskin pada kelompok level pendidikan yang lebih tinggi. Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk miskin dengan jenjang pendidikan tertinggi SD/SMP mencapai 42,8%. Persentase penduduk miskin dengan tingkat pendidikan tertinggi SMA ke atas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 24,66% di tahun 2014 dengan rata-rata kenaikan 2,47% per tahun.

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah menurunnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk miskin usia 7-12 tahun. Di tahun 2014 APS penduduk miskin pada kelompok usia ini turun menjadi 97,27% setelah pada tahun 2013 mencapai 98,52% dan bahkan 100% di tahun 2012. Dengan angka melek huruf (AMH) penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang telah mencapai 100%, maka penurunan APS ini mengindikasikan terdapat peningkatan persentase anak-anak usia sekolah pada rumah tangga miskin yang belum mengakses pendidikan dasar di Kabupaten Klaten.

Tabel 4. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten, Tahun 2010-2014

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
AMH 15-24 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMH 25-55 tahun	94,95	93,63	92,37	95,99	97,27
APS 7-12 tahun	100,00	95,96	100,00	98,52	98,47
APS 13-15 tahun	88,05	86,27	80,12	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2017)

Kondisi yang menarik terjadi karena angka putus sekolah di Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 0,22% di tahun 2015 menjadi 0,26% di tahun 2016, namun demikian justru disertai dengan penurunan yang signifikan pada angka melanjutkan sekolah (98,51% di tahun 2015 menjadi 95,65% di tahun 2016). Hal tersebut merupakan indikasi terdapat masalah pada kelompok lulusan sekolah yang menyebabkan keengganan dan atau ketidakmampuan melanjutkan studi.

2) Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk miskin yang bekerja di tahun 2014 mencapai 18,30% dari total 630.300 jiwa angkatan kerja di Kabupaten Klaten. Dari persentase tersebut mayoritas bekerja pada lapangan usaha non-pertanian. Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor ini pada tahun 2014 mencapai 43,38%. Hasil Susenas BPS mencatat di tahun 2014 masih terdapat 31,43% penduduk miskin di Kabupaten Klaten yang tidak bekerja (pengangguran). Meskipun angka ini turun dari tahun 2013 (38,23%) namun persentase ini tergolong besar berkisar 50 ribu jiwa miskin. Besarnya jumlah penganggur ini diduga ada kaitannya dengan rendahnya kompetensi penduduk miskin. Dengan kualifikasi yang dominan hanya berasal dari tamatan SD/SMP maka kesempatan kerja yang tersedia juga semakin kecil.

Keterkaitan Pendidikan dan Kemiskinan

Penelitian ini menghasilkan regresi panel dengan *random effect model* yang menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara penduduk yang tidak tamat SD dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. Kenaikan penduduk yang tidak tamat SD di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali sebesar satu persen akan meningkatkan persentase penduduk miskin di wilayah-wilayah tersebut rata-rata sebesar 1,495 persen (*ceteris paribus*). Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris adanya pengaruh antara angka partisipasi sekolah khususnya pada usia wajib belajar (7-12 tahun) dan persentase angka melek huruf pada penduduk kelompok usia produktif 15-55 tahun terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. Meski demikian, estimasi model yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut adalah negatif meski tidak signifikan.

Tabel 5. Hasil Regresi

No	Variabel	Koefisien (Standadr Error)
1	No_SD	1,495* (0,6529)
2	APS	-2,488 (8,1094)
3	AMH	-3,124 (5,0049)

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

* Signifikan pada tingkat signifikasnsi 5%

Hasil tersebut dapat menjadi referensi empiris bahwa peran pendidikan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perlunya peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui akses pendidikan dasar mampu mendorong penurunan persentase kemiskinan. Pendidikan dasar (SD) merupakan tahapan yang krusial bagi pembentukan kompetensi seseorang yang diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pengembangan kapabilitas di jenjang yang lebih tinggi. Amartya Sen

seperti dikutip oleh United Nations (2003) mengemukakan bahwa kontribusi pendidikan dasar bisa menjadi vital dalam membantu seseorang mendapatkan pekerjaan. Kemampuan orang-orang yang lebih miskin dalam menghadapi persaingan dan peluang global seringkali sangat dibatasi oleh keterbelakangan pendidikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara penduduk yang tidak tamat SD dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. Kenaikan penduduk yang tidak tamat SD sebesar satu persen akan meningkatkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali rata-rata sebesar 1,495 persen (*ceteris paribus*). Penelitian ini tidak menemukan bukti empiris adanya pengaruh antara angka partisipasi sekolah khususnya pada usia wajib belajar (7-12 tahun) dan persentase angka melek huruf pada penduduk kelompok usia produktif 15-55 tahun terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan Boyolali. Meski demikian, estimasi model yang dihasilkan menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut adalah negatif meski tidak signifikan.

Rekomendasi

- a) Menetapkan prioritas penanggulangan kemiskinan untuk penduduk miskin pada kelompok usia pendidikan dasar.
- b) Meningkatkan efektifitas pendistribusian alokasi dana bantuan siswa miskin.
- c) Membentuk sistem informasi manajemen *database* pendidikan dan kemiskinan yang *realtime* dan terstruktur.
- d) Menginisiasi survei angkatan kerja daerah (SAKERDA) untuk memperoleh profil tenaga kerja yang komprehensif di Kabupaten Klaten khususnya pada kelompok rumah tangga miskin.
- e) Memantau status rumah tangga yang telah keluar dari kemiskinan sebagai dampak dari program pengentasan kemiskinan, untuk memastikan agar tidak kembali jatuh dalam kelompok miskin.
- f) Memperluas *scope* program dalam klaster-2 melalui inisiasi kegiatan-kegiatan yang bersifat *entrepreneurship* khususnya bagi kelompok rumah tangga rawan miskin untuk memberikan modal bagi pengembangan kompetensi dan produktivitas dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, Masood. S, dkk. 2011. *Impact of Education on Poverty Reduction*. MPRA Paper No. 31826: Munich
- BAPPEDA Kabupaten Klaten. 2016. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Klaten Tahun 2016. BAPPEDA: Klaten
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2011. Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2002-2009. BPS: Semarang

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2009-2013. BPS: Semarang
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2010-2014. BPS: Semarang
- Coley, R. J dan Baker, B. 2013. Poverty and Education: Finding the Way Forward. Report for Educational Testing Service: Princeton
- Gujarati, D.N. dan Porter, D.C. 2009. Basic Econometrics. Edisi 5. New York. McGraw-Hill
- Pemerintah Kabupaten Klaten. 2017. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Sekretariat Daerah: Klaten
- Sukati, C.W.S. tanpa tahun. Reducing Poverty: Education Planning and Policy Implications for Swaziland. Educational Planning Vol. 19 No. 2
- TNP2K. 2017. Program bantuan Siswa Miskin (BSM). www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-bantuan-siswa-miskin-bsm. diakses 19 April 2017
- United Nations. 2003. Nobel Laureate Amartya Sen Stresses Empowering Role of Education and Need to Reform School Curricula, in Address to Population Commission. Press Release POP/859 2 April 2003. <https://www.un.org/press/en/2003/pop859.doc.htm>. diakses 19 April 2017
- Wooldridge, J.M. 2009. Introductory Econometrics: a Modern Approach, Edisi 4. South-Western Cengage Learning. Canada